

## DAFTAR PUSTAKA

- \_\_\_\_\_, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Daerah.* (2003). Jakarta.
- \_\_\_\_\_, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.* (2014). Jakarta.
- \_\_\_\_\_, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.* (1999). Jakarta.
- \_\_\_\_\_, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.* (2009). Jakarta.
- \_\_\_\_\_, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.* (2004). Jakarta.
- \_\_\_\_\_, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.* (2004). Jakarta.
- \_\_\_\_\_, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.* (2009). Jakarta.
- \_\_\_\_\_, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2007 Tentang Bagan Akun Standar.* (2007). Jakarta.
- \_\_\_\_\_, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.* (2005). Jakarta.
- \_\_\_\_\_, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.* (2010). Jakarta.
- \_\_\_\_\_, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.* (2006). Jakarta.
- \_\_\_\_\_, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.* (2013). Jakarta.
- Anjani, E.S.D (2016). *Pengaruh PAD, Dana Perimbangan dan Ukuran PEMDA terhadap Belanja Modal Kabupaten dan Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol 10 No 1, Maret 2016.
- Bawono, I. R., & Novelsyah, M. (2012). *Tata cara penatausahaan dan pertanggungjawaban bendahara pada SKPD dan SKPKD*, Salemba Empat.

- Erlina, Rambe, O.S., & Rasdianto. (2015). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual Berdasarkan PP.No. 71 Tahun 2010 dan Permendagri No. 64 tahun 2013*, Jakarta: Salemba Empat.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hoesada, J., (2016). *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Jaya, I.P.N.P.K., & Dwirandra, A.A.N.B. (2014). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah pada Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi ebagai Variabel Pemoderasi*. E Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 7.1 2014, hlm 79 – 92, ISSN 2302 – 8556.
- Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Jawa Barat – Mei 2017. Diakses 15 September 2018, dari <https://www.bi.go.id/id/publikasi/.../KEKR%20Jawa%20Barat%20Mei%202017.pdf>
- Karianga, H. (2013). *Carut Marut Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah: Prespektif Hukum dan Politik*. Depok: K E N C A N A.
- Lako, A. (2011). *Dekonstruksi CSR & Reformasi Paradigma Bisnis & Akuntansi*, Jakarta: Erlangga.
- Mawarni, D & Abdullah, S. (2013). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Serta Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Pada Kabupaten dan Kota di Aceh)*. Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, ISSN 2302 PP, hlm 80 -90.
- Kusuma, M.W. (2016). *Pengaruh DAU dan PAD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening*, JRAMB, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, UMB Yogyakarta Volume 2 No 1., Mei 2016, ISSN 2460 – 1233.
- Prastiwi, A., Nurlaela, S., & Chomsatu, Y. (2016). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Pegawai Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Surakarta*, Seminar Nasional IENACO – 2016, ISSN 2337 – 4349.
- Sesung, R. (2013). *Hukum Otonomi Daerah: Negara Kesatuan, Daerah Istimewa, Dan Daerah Otonomi Khusus*. Bandung: Refika Aditama.